

INTISARI

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan serta sarana dan prasarana publik lainnya sebagai bentuk kewajiban konstitusional. Pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur adalah belanja modal.

Belanja modal pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada proyek-proyek tertentu dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kenyamanan warganya untuk jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Otonomi Khusus (DOK) dan mekanisme penyalurannya terhadap alokasi belanja modal pada 23 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2016.

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan model estimasi *Random Effect Model* (REM). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang telah diaudit oleh BPK RI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOK) dan mekanisme penyaluran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Belanja Modal, Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM).

ABSTRACT

In order to achieve the objectives of the state as stated in the 1945 Constitution, among others, to promote the general welfare and educate nation's life, then the regional government needs to undertake the development of education infrastructure, health infrastructure and other public infrastructures as a form of constitutional obligation. Local government expenditure directly related to infrastructure development are capital expenditure.

Government capital expenditures are fund that incurred by the government on particular projects in order to improve people's living standard and create the comfort of their citizens over a long period of time, usually more than a year. This study aims to examine and obtain empirical evidence on the effect of Regional Own-source Revenue (PAD), Balance Fund which consisting of Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Special Autonomy Fund (DOK) and distribution mechanism to allocation of capital expenditures on 23 regencies and municipalities in Aceh Province during 2010-2016 period.

This research uses panel data regression method with estimation model is Random Effect Model (REM). The type of data used in this study is secondary data obtained from the budget realization report of regencies and municipalities government in Aceh Province that have been audited by Supreme Audit Board (BPK RI).

The results showed simultaneously that all independent variables have significant effect on capital expenditure. Partially, Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK), Special Autonomy Fund (DOK) and distribution mechanism have positive and significant effect on capital expenditure. While Regional Own-source Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) have no significant effect on capital expenditure in regencies and municipalities in Aceh Province.

Keywords: Regional Own-source Revenue, Balance Fund, Special Autonomy Fund, Capital Expenditure, Random Effect Model (REM) Pool Data Regression.